

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abdul Rozaki, dkk, 2005, *Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa*, Yogyakarta: IRE Press.

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo.

Aries Djaenuri, dkk, 2018, *Sistem Pemerintahan Desa*, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

Bambangan Trisantono Soemantri, 2011, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Bandung: Fokusmedia.

Dasril Radjab, 2005, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.

Hanif Nurcholis, 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Erlangga.

HAW Wijaya, 2002, *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

\_\_\_\_\_, 2012, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Himawan S Pambudi, 2003, dkk, *Politik Pemberdayaan: Jalan Mewujudkan Otonomi Desa*, Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama.

Jeremy Bentham, 2013, *Teori Perundang-Undangan (The Theory of Legislation)*, diterjemahkan oleh Nurhadi, Bandung: Nuansa Cendekia dan Nusa Media.

Jimly Asshidiqie, 2010, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta : Rajawali Pers.

Josef Riwu Kaho, 1982, *Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Bima Aksara.

M. Solly Lubis, 1989, *Landasan dan Teknik Perundang-Undangan*, Bandung: Mandar Maju.

Mahendra Putra Kurnia, dkk, 2007, *Pedoman Naskah Akademik Perda Partisipatif*, Yogyakarta: Kreasi Total Media.

Moch. Solekhan, 2014, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbentuk Partisipasi Masyarakat*, Malang: Setara Press.

Muhamad Mu'iz Raharjo, 2021, *Pokok-Pokok dan Sistem Pemerintahan Desa*, Jakarta: RajaGrafindo Persada

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Ni'matul Huda, 2020, *Hukum Pemerintahan Desa*, Malang: Setara Press.

Rianto Adi, 2010, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit.

Rosyid Al Atok, 2015, *Konsep Pembentukan Perturan Perundang-Undangan: Teori, Sejarah dan Perbandingan dengan Beberapa Negara Bikameral*, Malang: Setara Press.

Sadu Wastiono dan M. Irwan Tahir, 2019, *Administrasi Pemerintahan Desa*, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

Sarundajang, 2005, *Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Kata Hasta.

Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

\_\_\_\_\_ dan Sri Mamudji, 2018, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Titik Triwulan Tutik, 2017, *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republic Indonesia Tahun 1945*, Depok: Prenadamedia Grup.

Y.W. Sunindhia, 1996, *Praktek Penyelenggaraan Pemerintah di Daerah*, Jakarta: Rineka Cipta.

Zainuddin Ali, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa

### C. Website

Bangun\_Desa, *Perbedaan Desa dan Desa Adat*, <https://desabangsa.wordpress.com/2015/01/03/perbedaan-desa-dan-desa-adat/>

Bayu Dwi Anggono, 2018, *Tertib Jenis, Hierarki, Dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan: Permasalahan Dan Solusinya*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 47 No. 1. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/17376/13370>

Choky Ramadhan, 2018, *Konvergensi Civil Law dan Common Law di Indonesia dalam Penemuan dan Pembentukan Hukum*, Jurnal MIMBAR HUKUM, Vol. 30 No. 2. <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/31169/21790>

Dirgantara Dani Putra, 2019, *Hubungan dan Peran Serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintahan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Skripsi Universitas Sebelas Maret, Surakarta. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/12273/Hubungan-dan->

[peran-serta-badan-permusyawaratan-desa-BPD-dan-pemerintah-desa-dalam-penyelenggaraan-pemerintahan-desa](#)

Dodik Prihatin, 2017, *Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa*, Jurnal Rechtsens, Vol. 6 No. 1. <http://ejurnal.uij.ac.id/index.php/REC/article/view/195>

Dody Eko Wijayanto, 2014, *Hubungan Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa*, Jurnal Independent, Vol. 2 No. 1. <http://jurnalhukum.unisla.ac.id/index.php/independent/article/view/17>

Evi Fitriyani Aulia, *kekuasaan dan kewenangan*. <https://www.kompasiana.com/epoooy19/552fc21e6ea83417338b4567/kekuasaan-dan-kewenangan>

Fahrudin Ari Wibowo, Andina Elok Putri Maharani, 2019, *Optimalisasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembuatan Produk Hukum Desa Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*, Res Publik Jurnal Hukum Kebijakan Publik, Vol. 3 No. 3. <https://pusdem.lppm.uns.ac.id/wp-content/uploads/sites/22/2020/01/3.3.pdf>

Jorawati Simarmata, Damai Magdalena, 2015, *Kedudukan dan Peranan Peraturan Desa Dalam Kerangka Otonomi Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 12 No. 3. <http://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/414>

Riza Multazam Luthfy, 2014, *Fungsi Legislatif Desa Pasca Reformasi*, Jurnal Yuridis, Vol. 1 No. 1. <https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/138>

Setiawati, 2018, *Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol. 5 No. 1. <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/PKn/article/view/1170>

Wikipedia, *Badan Permusyawaratan Desa*.  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Badan\\_Permusyawaratan\\_Desa](https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Permusyawaratan_Desa)



# ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN LEGISLASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA

## ABSTRAK

(Rizka Ananda Alyan 1710111086, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program  
Kekhususan Hukum Tata Negara, 100 Halaman, 2021)  
Pembimbing: Ilhamdi Taufik, S.H., M.H. dan Alsyam, S.H., M.H.

Badan Permusyawaratan Desa yang kemudian disebut dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. BPD memiliki fungsi yang salah satunya untuk membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. Hal ini tercantum dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Peraturan Desa merupakan produk hukum tingkat desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat. Pada penelitian *pertama* membahas tentang kewenangan legislasi BPD dalam pembentukan Peraturan Desa. *Kedua*, faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pembentukan Peraturan Desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Data yang digunakan adalah bahan data primer yang berupa peraturan perundang-undangan, dan data sekunder berupa buku-buku, jurnal, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian, di samping itu penelitian ini juga ditunjang wawancara dengan Kepala Desa dan Ketua BPD Talawi Hilie Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat untuk mendapatkan keterangan ahli serta mengklarifikasi data sekunder yang telah dikumpulkan. Dari hasil penelitian penulis, dapat disimpulkan bahwa kewenangan legislasi BPD dalam pembentukan Peraturan Desa memiliki andil yang sangat penting. Karena usulan Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari BPD lebih diprioritaskan sedangkan usulan Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan. Hal ini didukung Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Dalam pembentukan Peraturan Desa ada terdapat faktor yang mempengaruhi. Salah satunya pola hubungan kerja BPD dengan Kepala Desa yang bersifat kemitraan, konsultatif, koordinatif. Kewenangan legislasi BPD yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertujuan agar proses penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan kerangka NKRI. Dengan demikian perlunya dilakukan sosialisasi kepada masyarakat desa untuk memberikan pemahaman terhadap tujuan tersebut.

**Kata Kunci:** Kewenangan Legislasi, Badan Permusyawaratan Desa, Peraturan Desa